

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA BANGUNAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Achmad fadhilah
NPP.30.1603

*Asdaf Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email : achmadfadhilah016@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Ely Sukmana, S.H, M.H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of swiftlet nest breeders who do not have a swallow's nest business permit in Tana Tidung Regency. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the swallow's nest business license policy in Tana Tidung Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. In analyzing the implementation of the swallow's nest business permit policy in Tana Tidung Regency, George C. Edwards III's Theory was used, which contained factors for successful policy implementation, namely resources, disposition, bureaucratic structure, and communication. **Result:** The results found by researchers in the field are that the implementation of the swallow's nest business license policy has not run optimally. Many swiftlet nest breeders do not have a swallow's nest business permit and do not know about the swallow's nest permits that have been integrated with the oss system. **Conclusion:** The results of this study concluded that the implementation of the swallow's nest business permit policy in Tana Tidung Regency has not been running optimally and effectively. In terms of communication factors, the government has conducted socialization regarding business licenses integrated by OSS (Online Single Submission) but not on target. Resource factors such as limited budgetary and staff resources and information that has not been conveyed to swiftlet nest breeders. The disposition factor is seen from the government's attitude that is not serious in dealing with problems that occur in the management of swallow's nests, the government that is not serious in giving sanctions, reprimands, and punishments for swallow nest managers who do not have permits. Factors in the bureaucratic structure where the regulations governing business licensing procedures have not been adjusted according to the new central government regulations. The obstacles that occur are communication that has not gone well. Many swiftlet nest breeders have never received socialization regarding the new business permit regulations that have been integrated by the OSS (Online Single Submission). The government's

responsibilities and commitments are not yet serious, such as the RTRW (Regional Spatial Planning) has not been issued yet, regulations that have not been adapted to the new laws and regulations, and the community that requires an evaluation of the current regulations or policies.

Keywords : The Policy, Implementation, Business Permit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penulis memfokuskan pada permasalahan peternak sarang burung walet yang belum memiliki izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam menganalisis implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung menggunakan Teori George C. Edwards III yang terdapat faktor – faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan komunikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah pelaksanaan kebijakan izin usaha sarang burung walet belum berjalan dengan optimal. peternak sarang burung walet banyak yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet dan tidak mengetahui tentang perizinan sarang burung walet yang telah diintegrasikan dengan sistem OSS Kesimpulan: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung belum berjalan dengan optimal dan efektif. Dalam faktor komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait izin usaha yang diintegrasikan oleh OSS (*Online Single Submission*) tetapi belum tepat sasaran. Faktor sumber daya seperti sumber daya anggaran dan staf yang terbatas dan informasi yang belum tersampaikan kepada peternak sarang burung walet. Faktor disposisi dilihat dari sikap pemerintah yang tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi pada pengelolaan sarang burung walet, pemerintah yang tidak serius dalam memberikan sanksi, teguran, dan hukuman bagi pengelola sarang burung walet yang tidak memiliki izin. Faktor struktur birokrasi dimana peraturan yang mengatur prosedur izin usaha belum disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Banyak peternak sarang burung walet yang belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait peraturan izin usaha yang baru yang telah diintegrasikan oleh OSS (*Online Single Submission*). Tanggung jawab dan komitmen pemerintah yang belum serius seperti belum terbitnya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), peraturan yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, dan masyarakat yang Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Izin Usaha

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini diatur lebih lanjut di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu di sektor peternakan. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya salah satunya sumber daya alam hayati dan apabila dikelola dengan bijak akan berpotensi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menjadi potensi untuk sumber daya alam hayati di Indonesia adalah Burung Walet.

Sarang burung walet memiliki manfaat baik secara ekonomi maupun ekologi. Di antara negara-negara penghasil sarang Burung Walet lainnya seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, Indonesia menguasai hampir 80% pasar sarang Burung Walet dunia, terutama sarang Burung Walet yang dibudidayakan di rumah atau gedung (Iswanto, 2002).

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki bangunan sarang burung walet terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara. Menurut data Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung, jumlah rumah Burung walet yang ada di Kabupaten Tana Tidung mencapai 1.454 unit. Potensi sarang Burung Walet ini sangatlah bagus di Kabupaten Tana Tidung. Potensi sarang Burung Walet ini bisa menjadi pemasukan yang besar di Kabupaten Tana Tidung dan menjadi Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Usaha Sarang Burung Walet. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan terhadap sarang Burung Walet sehingga masyarakat dapat menjadi tertib administrasi dalam pengelolaan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung bahwa hanya ada 1 (satu) pengusaha sarang Burung Walet yang telah terdaftar di sistem OSS (*Online Single Submission*) dan 4 (empat) usaha sarang Burung Walet yang masih dalam proses di sistem OSS (*Online Single Submission*).

Dalam melaksanakan usaha sarang Burung Walet haruslah memperhatikan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Apabila pengelola sarang Burung walet tidak memiliki izin pengelolaan dan perusahaan sarang Burung walet maka itu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar bangunan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Permasalahan yang terjadi di dalam izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung adalah banyak peternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung bahwa hanya ada 1 (satu)

pengusaha sarang Burung Walet yang telah terdaftar di sistem OSS (*Online Single Submission*) dan 4 (empat) usaha sarang Burung Walet yang masih dalam proses di sistem OSS (*Online Single Submission*). Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak peternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet. Padahal tujuan dari adanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan dan perusahaan sarang Burung Walet, mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang timbul dari kegiatan pengelolaan dan perusahaan sarang Burung Walet dan melindungi kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta keindahan lingkungan

Adapun peraturan sekarang yang belum disesuaikan dengan peraturan yang baru dimana izin pengelolaan sarang burung walet dilakukan melalui sistem OSS (*Online Singlen Submission*). Sehingga prosedur dan teknis pengelolaan izin usaha sarang burung walet yang diatur dalam peraturan bupati belum disesuaikan dengan peraturan yang baru. Apabila prosedur dan teknis telah diperbarui, harapannya akan memudahkan proses perizinan sarang burung walet

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Rinaldy May Wendra, Teuku Afrizal, Eko Supriyono, Siauw Tiffani Setiono, Annisa dan Nurfitriani Fatimah (2020), melakukan penelitian dengan membuat jurnal tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. Jurnal tersebut memakai metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi pustaka. Peneliti menggunakan model Edward III. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan usaha sarang Burung Walet masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat hambatan-hambatan dalam penerbitan izin usaha penangkaran sarang Burung Walet seperti koordinasi antar dinas terkait, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, minimnya pengawasan dinas yang berwenang. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang memperhatikan dampak lingkungan dan sanksi yang lebih tegas. Putri Fransiska Purnama Pratiwi & Nuraliah Ali (2021) Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Dusun Timur Barito. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Kebijakan Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet belum dilaksanakan secara optimal. Masalah Penegakan Perjanjian Perizinan dan Pemanfaatan Burung Walet Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan maksimal karena belum terbentuknya tim terpadu, belum ada aturan pelaksanaannya yaitu Perbup, belum dilaksanakannya sosialisasi, belum ada penegakan hukum dan masih kurangnya orang yang terlibat. budidaya sarang walet kesadaran hukum. Pemelihara sarang burung walet yang tidak berizin semakin meningkat, mengakibatkan pemerintah kota tidak mampu memungut pajak, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan daerah. Wahyudi, Adia Ferizko, Wasiah Sufi (2021) Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan dan Perusahaan Penangkaran

Burung Walet. Lokus dilaksanakan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah penerapan peraturan izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran Burung walet sudah berjalan tetapi masih terdapat kendala seperti masih kurangnya pengawasan dan sosialisasi serta penerapan sanksi bagi pengusaha yang melanggar.

Rinaldy May, Tri Yuniningsih, Endang Larasati (2021) Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Lokus berada di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penentuan informan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian adalah Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet belum efektif. Komunikasi dengan kelompok sasaran adalah dilakukan melalui sosialisasi, tetapi tidak praktis. Kuantitas manusia sumber daya masih terbatas. Anggaran untuk operasional usaha sarang burung walet perizinan masih belum optimal. Fasilitas juga masih belum optimal. Kebijakan terlihat dari komitmen pelaksana kebijakan cenderung kurang. Koordinasi di proses pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Faktor pendukung adalah asumsi asumsi dan realitas kebijakan eksplisit, sumber daya otoritas, sosial dan kondisi politik, serta dukungan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah informasi yang membentuk perumusan kebijakan, sumber daya aparatur, anggaran, fasilitas; kebutuhan ekonomi; dan dukungan kelompok sasaran.

Arini Khairun Nisa, Febri Yuliani, Rico Purnawandi Pane (2023) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Lokus berada di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah masih belum maksimalnya sosialisasi (komunikasi) yang diberikan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana (fasilitas) yang belum maksimal dengan memanfaatkan website yang sudah ada. Disposisi atau sikap pelaksana, aparatur sebagai pelaksana masih memiliki tanggung jawab dan komitmen yang rendah dalam menjalankan tugasnya. Standard Operational Procedure (SOP), syarat dan ketentuan sudah jelas. Namun masyarakat menilai bahwasanya persyaratan untuk urus izin usaha masih sulit. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yaitu kurangnya kesadaran dan komitmen aparatur Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab melaksanakan tugasnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana lokus dan waktu penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terdapat kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy dkk, Arini Khairun Nisa dkk, dan wahyudi dkk kecuali Putri Fransiska. Selain itu model implementasi kebijakan yang dipakai sama dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Model Implementasi

Kebijakan George C Edwards III (1980) kecuali penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk dan Putri Frasiska dkk.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung, mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian “ Implementasi Kebijakan Izin Usaha Bangunan Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung ” yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Salim dan Syahrudin (2007) berpendapat bahwa adalah “ penelitian yang tidak memiliki prosedur yang bersifat kuantifikasi yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer tersebut didapatkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan literatur, perpustakaan, dan jurnal ilmiah merupakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman (1992), Teknik analisis data yang digunakan 3 (tiga) metode kegiatan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi/penarikan kesimpulan (*verification*). Penulis melakukan wawancara terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, masing-masing 1 orang, Pengusaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung berjumlah 2 orang, dan Masyarakat Yang Tinggal di Kawasan Bangunan Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung berjumlah 10 orang. Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sering menggunakan purposive sampling. Adapun dalam menganalisis permasalahan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) terdapat 4 (empat) variabel yang merupakan faktor keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III dimana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian penulis menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor

penghambat penghambat dari implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung.

3.1 Implementasi Kebijakan Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung

a. Komunikasi

Dalam dimensi komunikasi belum berjalan dengan optimal. Pada faktor transmisi atau penyaluran komunikasi belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang dilakukan belum tepat sasaran. Kemudian faktor kejelasan belum berjalan dengan optimal karena banyak peternak sarang burung walet yang tidak mengetahui tentang izin usaha yang telah diintegrasikan oleh OSS (Online Single Submission). Faktor konsistensi sudah terlaksana dengan baik hanya sosialisasi terkait izin usaha yang belum tepat sasaran.

b. Sumber Daya

Dalam dimensi sumber daya belum berjalan dengan optimal. Faktor sumber daya staf dan sumber daya fasilitas masih belum berjalan dengan optimal karena staf atau pegawai dan fasilitas yang masih terbatas seperti sarana transportasi yang belum memadai. Kemudian faktor sumber daya wewenang sudah berjalan dengan baik karena telah diatur terkait wewenang dinas yang bersangkutan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung sehingga tidak ada wewenang yang ganda diantara dinas – dinas. Faktor sumber daya informasi belum berjalan dengan baik karena masih banyak peternak sarang burung walet yang tidak mengetahui izin usaha sarang burung walet yang telah diintegrasikan oleh OSS (Online Single Submission).

c. Disposisi

Dalam dimensi disposisi belum berjalan dengan optimal. Pada faktor sikap belum berjalan dengan optimal. Pemerintah belum serius dalam memberikan tindakan, sanksi, dan teguran kepada peternak sarang burung walet yang melanggar peraturan. Kemudian pada faktor komitmen sudah berjalan cukup baik hanya saja kerja sama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dinas terkait masih belum berjalan dengan baik. Terdapat dinas yang belum serius dalam menangani permasalahan terkait izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang belum siap dalam melaksanakan kebijakan izin usaha sarang burung walet. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan salah satu syarat dalam mengeluarkan izin usaha sarang burung walet.

d. Struktur Birokrasi

Dalam dimensi struktur birokrasi masih belum berjalan dengan optimal. Pada faktor Standard Operational Procedure (SOP) dapat dilihat dari prosedur dan teknis yang ada belum disesuaikan dengan peraturan baru dari pusat yang diintegrasikan dengan OSS (Online Single Submission). Kemudian faktor fragmentasi belum berjalan dengan baik karena masih terdapat dinas yang belum siap dan serius dalam menjalankan kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung.

3.2 Faktor Penghambat dari Implementasi Kebijakan Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi yang belum optimal dimana pemerintah yang belum pernah melakukan sosialisasi terkait izin usaha sarang burung walet yang diintegrasikan dengan OSS (Online Single Submission) kepada peternak sarang burung walet sehingga peternak sarang burung walet belum mengetahui mekanisme pengurusan izin usaha sarang burung walet .
- b. Sikap dan komitmen aparatur pemerintah yang tidak serius dalam mengurus dan mengelola sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah yang belum mengeluarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terhambat terbitnya izin usaha sarang burung walet.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan forum diskusi antara pemerintah dan peternak sarang burung walet. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu membuat forum diskusi melalui aplikasi Whatsapp. Sehingga antara pemerintah dan peternak sarang Burung Walet terjadi komunikasi dua arah. Apapun yang menjadi kendala di antara pemerintah dan peternak sarang Burung Walet bisa dibahas bersama-sama dan solusi bisa ditemukan.
- b. Menetapkan Rencana Detail Tata Ruang. Pemerintah sedang berupaya membahas terkait Rencana Detail Tata Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang membahas terkait Rencana Detail Tata Ruang sehingga akan memudahkan dalam persyaratan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet memiliki kendala dimana banyak peternak sarang burung walet yang belum mempunyai izin usaha sarang burung walet melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) karena mereka belum menerima sosialisasi terkait izin usaha sarang burung walet melalui OSS (*Online Single Submission*). Adapun dari pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait OSS (*Online Single Submission*) tetapi kepada pelaku UMKM bukan kepada peternak sarang burung walet dan sikap pemerintah yang tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi seperti belum ada tindakan tegas, peringatan, dan sanksi untuk pengelola sarang burung walet yang belum memiliki izin usahanya dan RDTR yang belum ada sehingga

persyaratan izin usaha sarang burung walet menjadi terhambat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Rinaldy May Wendra, Teuku Afrizal, Eko Supriyono, Siauw Tiffani Setiono, Annisa dan Nurfitriani Fatimah (2020) hasil yang ditemukan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian sama dengan penelitian Putri Fransiska Purnama Pratiwi & Nuraliah Ali (2021) dan Arini Khairun Nisa, Febri Yuliani, Rico Purnawandi Pane (2023) dimana hasil penelitiannya kurangnya sosialisasi dan tidak dilakukannya penegakan hukum. temuan ini memperkuat temuan selanjutnya. Rinaldy May, Tri Yuniningsih, Endang Larasati (2021) dan Wahyudi, Adia Ferizko, Wasiah Sufi (2021) dimana Koordinasi di proses pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan. Pemerintah belum serius dalam menangani peternak sarang burung walet yang tidak patuh dengan kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Usaha Bangunan Sarang Burung Walet di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan faktor-faktor teori George C. Edwards III mempengaruhi sebuah kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan dengan optimal. Pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait perizinan usaha yang diintegrasikan oleh OSS (*Online Single Submission*) tetapi kepada pelaku UMKM bukan kepada peternak sarang Burung Walet sehingga masyarakat tidak tahu terkait izin usaha bangunan sarang Burung Walet yang telah diperbarui. Kemudian Faktor sumber daya sudah berjalan dengan baik tetapi pada faktor sumber daya staf dan fasilitas masih terbatas. Akses daerah terpencil yang sulit dijangkau dan minimnya sarana dan prasarana membutuhkan anggaran yang besar. Sumber daya wewenang dalam implementasi kebijakan izin usaha bangunan sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung berjalan dengan optimal karena tidak ada kewenangan ganda yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Faktor disposisi belum berjalan dengan optimal dari faktor sikap, pemerintah belum ada Tindakan tegas, peringatan, dan sanksi untuk pengelola sarang Burung Walet yang belum memiliki izin usahanya. Kemudian teknis izin usaha dan prosedur yang belum disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga banyak pengelola sarang Burung Walet yang belum memiliki izin. Faktor fragmentasi juga belum berjalan dengan baik dilihat dari salah satu dinas yang belum serius dalam menjalankan kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet yaitu komunikasi yang belum optimal kemudian sikap dan komitmen aparat pemerintah yang tidak serius. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung yaitu Mengadakan forum diskusi antara pemerintah dan peternak sarang burung walet Menetapkan Rencana Detail Tata Ruang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan sarana prasarana. Terbatasnya sarana dan prasarana peneliti dalam melakukan penelitian di daerah terpencil.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Iswanto, Hadi. 2002. *Walet: Budidaya dan Aspek Bisnisnya*. Jakarta: Agromedia Pustaka.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP

Salim dan Syahrudin. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Citaustaka Media

Sugiyono. 2016 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet. Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Usaha Sarang Burung Walet

C. Jurnal dan Skripsi

Rinaldy dkk. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru." *Jurnal Perspektif*, 9 (2) (2020): 397- 405

Wahyudi dkk. 2021. " Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak". *Jurnal Ilmiah Publika* Vol.9, No.2

Putri, F., P., P., Nuraliah, A. 2021. "Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah: Regulasi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan". *Palangka Law Review*, vol: 1, no: 2, Edisi: September 2021

Arini dkk. 2023. "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023